



PENETAPAN

Nomor : 0031/Pdt. P/2016/PA Xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxyang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu sidang keliling insidentil telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1 bin ayahnya, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Xxx, RT.06, RW.04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2 bin ayahnya, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Xxx, RT.06, RW.04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Nomor 0031/Pdt. P/2016/PA Xxx., pada tanggal 13 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 07 Desember 2012, di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Babul Amin Xxx bernama Wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Anak 1, laki-laki, 12 April 2013, umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak 1, perempuan, 30 November 2015, umur 1 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2012, di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara tersebut pada

Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2016 dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor : 31/Pdt. P/2016/PA Xxx., tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara.
4. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 13 Juli 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa:

BUKTI SURAT

- 1- Asli surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 53.28.2007.01/78/2016 an.

Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxx dan oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);

BUKTI SAKSI

Saksi I, Saksi 1, umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT. 07/RW. 04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, saksi adalah keluarga pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- 2- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 07 Desember 2012 .
- 3- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- 4- Bahwa yang menikahkan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) adalah Imam Masjid Babul Amin Xxx bernama Wali nikah.
- 5- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2.
- 6- Bahwa adapun maharnya berupa uang sebesar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai.
- 7- Bahwa Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) menikah di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx.
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejakasedangkan pemohon II berstatus perawan .

- 1- Bahwa antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan.

Saksi II, Saksi 2, umur 62 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT. 04/RW. 02, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten. Xxx, saksi adalah tetangga para pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- 2- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 07 Desember 2012 ;
- 3- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- 4- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Masjid Babul Amin Xxx bernama Wali nikah.
- 5- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 .
- 6- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar lima puluh ribu rupiah;
- 7- Bahwa pernikahan dilangsungkan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- 8- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejakasedangkan pemohon II berstatus perawan ;
- 9- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Ketua Majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Ketua Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara kompetensi absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata berdomisili di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, serta para pemohon telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxx sebagai pengadilan yang mewilayahi yurisdiksi hukum warga Negara Kabupaten Xxxyang mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 Reglemen Buiten Govesten (R.Bg), maka perkara ini secara kompetensi relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Xxx.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (**legal standing**) para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa *fundamentum petendi* (posita) surat permohonan para pemohon yang didalamnya menjelaskan *reckhtelijke gronden* (dasar hukum) dan *feitelijke gronden* (dasar fakta) adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa, dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2012di Desa Xxx,Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxxdapat diitsbatkan/disahkan; Menimbang

bahwa, untuk membuktikan apakah para pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan tersebut adalah berupa pengetahuan secara langsung dan mendengarkan peristiwa tersebut secara langsung, dan menurut keterangan tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara para pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga menurut hukum para pemohon memilikipersona *standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, dan permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak para Pemohon, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumumam Pengadilan Agama Xxx dengan tenggang waktu 14 hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I (Pemohon 1) dengan pemohon II (Pemohon 2) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah pemohon I (Pemohon 1) dengan pemohon II (Pemohon 2) telah menikah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa, dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa

Hal. 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tanggal 07 Desember 2012, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Pemohon 1 dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon 2 dengan mahar adalah uang sebesar lima puluh ribu rupiah dengan saksi-saksi dalam pernikahan ialah masing-masing Saksi nikah 1 sebagai saksi I dan dihubungkan dengan keterangan Saksi nikah 2 sebagai saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid Babul Amin Xxx bernama Wali nikah;

Menimbang bahwa, saksi-saksi para Pemohon memberi keterangan yang bersumber dari pengetahuan secara langsung dan saling berkaitan satu sama lain bahwa pernikahan pemohon I (Pemohon 1) dengan pemohon II (Pemohon 2) telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 07 Desember 2012, dengan mahar adalah uang sebesar lima puluh ribu rupiah, dan sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, serta yang menikahkan adalah Imam Masjid Babul Amin Xxx bernama Wali nikah, maka pernikahan antara pemohon I (Pemohon 1) dengan pemohon II (Pemohon 2) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 07 Desember 2012 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa, para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I (Pemohon 1) berstatus jejaka dan pemohon II (Pemohon 2) berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa, keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut menerangkan bahwa pemohon I (Pemohon 1) sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan pemohon II (Pemohon 2) berstatus jejaka dan begitu juga dengan pemohon II (Pemohon 2) yang berstatus perawan sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan pemohon I (Pemohon 1) serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, bahkan untuk menjaga supaya tidak terjadi penyelundupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nikah **a quo** melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Xxx dengan tenggang waktu 14 hari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, oleh karena itu dalil-dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa pemohon I (Pemohon

- 1) sebelum menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II (Pemohon
- 2) berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 7 dari 14 Hal.



Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, hal ini sesuai dengan Nash Syar'i dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang berbunyi :

 \ddot{a}_C

Menimbang bahwa, apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang bahwa, pernikahan pemohon I (Pemohon 1) dan pemohon II (Pemohon 2) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, pernikahan yang terjadi antara pemohon I (Pemohon 1) dengan pemohon II (Pemohon 2) tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para

Hal. 8 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa, perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2012 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa, terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwadalam perkara a quo, para pemohon adalah salah satu masyarakat Kabupaten Xxx yang termasuk dalam kelompok miskin dari segi ekonomi dan secara geografis letak tempat tinggal para pemohon sangat jauh dari pusat ibukota Kabupaten Xxx sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini para pemohon bukan hanya menghadapi hambatan biaya secara ekonomi tetapi hambatan jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalan sebagai sarana penunjang sangatlah menjadi penghalang dan hambatan dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, sehingga sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;
2. Bahwaperkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwaperkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;
4. Bahwaperkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;
5. Bahwaperkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan para pemohon sehingga perkawinan para pemohon mempunyai kekuatan hukum, dan para Pemohon dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat Negara telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki identitas hukum dikarenakan mereka adalah orang miskin, mereka terhambat oleh jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan yang tidak memadai sebagai sarana penunjang kebutuhannya, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat, hal demikian tentunya tidak sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (1) yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dan ayat (2) berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, akan dirasakan tidak adil oleh para pemohon jika permohonan isbat nikah para pemohon ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari kelalaian Negara tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis Majelis Hakim, yang berbunyi :

ú úó óóñóóóöö óó úóúó
öäÇöãäÇöEáÍíáUäÍPäÍOÇYãäÇÄÑİ öİ

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon menikah;

Menimbang bahwa, oleh karena biaya atas perkara ini telah diajukan

Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Xxx Nomor : 31/Pdt. P/2016/PA Xxx pada tanggal 3 Agustus 2016;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa, karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang berlangsung pada tanggal tanggal 07 Desember 2012 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan oleh Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Xxx Nomor: 31/Pdt. P/2016/PA Xxx tanggal 3 Agustus 2016 maka para pemohon dibebaskan dalam biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2 bin ayahnya**) ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan pemohon II (**Pemohon 2 bin ayahnya**) pada tanggal tanggal 07 Desember 2012 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx untuk mencatat pernikahan pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan pemohon II (**Pemohon 2 bin ayahnya**) pada register atau blangko yang disiapkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan Pemohon II

Hal. 12 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon 2 bin ayahnya) dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah. Oleh kami Hakim 1 sebagai Ketua Majelis, Hakim 2. dan Hakim 3., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Panitera sidang., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim 2

Ketua Majelis

ttd

Hakim 1

Hakim Anggota II,

ttd

Hakim 3

Panitera Pengg

ttd

Panitera sidang

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. Nihil
Biaya Proses	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon I	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon II	: Rp. Nihil
Redaksi	: Rp. Nihil
Meterai	: Rp. Nihil
J u m l a h	: Rp. Nihil

Xxx, 3 Agustus 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Xxx

Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17